

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki paruh awal abad ke-20, Indonesia yang ketika itu masih wilayah Hindia Belanda, bergerak menuju sebuah zaman yang dinamis. Kaum bumiputra sebagai golongan bangsa terjajah mulai bergerak kembali melawan kolonialisme serta imperialisme. Zaman ini ditandai dengan munculnya kesadaran nasional bumiputra sebagai sebuah bangsa. Dari segi politik, kaum bumiputra menemukan cara-cara baru dalam menghadapi penjajahan Belanda. Cara yang digunakan oleh kaum Bumiputra ialah dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Perkembangan yang paling penting dan khas pada masa pergerakan nasional di Indonesia yaitu munculnya ide-ide baru tentang organisasi pergerakan dan kesadaran akan identitas sebagai sebuah bangsa (Ricklefs, 2008, hlm. 353). Organisasi sebagai kumpulan orang-orang dengan kesamaan tujuan, mampu menjadi wadah pergerakan dengan asas dan tujuan yang jelas. Kesadaran sebagai sebuah bangsa, cita-cita kebebasan serta kemerdekaan dapat disalurkan melalui aktifitas organisasi. Melalui organisasi kaum bumiputra juga mampu berdinamika politik massa. Sehingga, kaum bumiputra menjadi partisipan aktif dalam dinamika politik di Hindia-Belanda. Dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang sampai hari ini masih banyak diakui “kebangkitan nasional” ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO) pada tahun 1908 oleh kumpulan pelajar STOVIA. Berdirinya Boedi Oetomo diikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan selanjutnya seperti Sarekat Islam, *Indische Partij*, Partai Komunis Indonesia (PKI), dll.

Boedi Oetomo (BO), Sarekat Islam (SI), *Indische Partij* (IP), dan belakangan Partai Komunis Indonesia (PKI) tergolong organisasi-organisasi pertama yang tumbuh pada perkembangan awal gerakan kaum bumiputra. Bermula dari gagasan Wahidin Soedirohoesodo, Boedi Oetomo resmi didirikan pada tahun 1908 oleh sejumlah siswa STOVIA dan Soetomo menjadi ketua pertama BO. Boedi Oetomo merupakan organisasi nasionalis kultural yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk kemajuan kaum bumiputra. Namun, sejak organisasi-organisasi nasionalis dengan orientasi politik bermunculan, banyak

anggota BO yang keluar kecuali para bangsawan yang orientasi politiknya konservatif (Kahin, 2013, hlm. 92-92). Tiga tahun kemudian pada tahun 1911 sebuah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam yang hanya bergerak di bidang ekonomi bertransformasi menjadi Sarekat Islam untuk bergerak di bidang politik. Sarekat Islam yang semula digerakkan oleh kaum borjuasi kecil Islam di Surakarta kemudian berubah menjadi gerakan massa yang berasal dari berbagai kelas sosial. Selanjutnya Indische Partij didirikan pada tahun 1912 dan dipimpin oleh tiga serangkai Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat. IP menjadi organisasi pertama yang memperkenalkan gagasan nasionalisme Hindia dan menuntut kemerdekaan dari Belanda. Kemudian Partai Komunis Indonesia, meski secara formal baru lahir belakangan pada tahun 1924, ia merupakan organisasi komunis pertama di Hindia Belanda yang punya gerakan massif dan progresif. Baik BO, SI, IP, dan PKI bisa dilihat sebagai manifestasi perkembangan ide-ide modern diantara kaum terpelajar bumiputra. Ide-ide yang berkembang bisa berupa kebangsaan, demokrasi, organisasi, dan ideologi pergerakan. Paling tidak, diantara ide-ide di atas ideologi pergerakan termasuk ide yang menjadikan pergerakan nasional di Hindia Belanda menjadi lebih dinamis.

Ideologi atau paham yang populer didiskusikan dan digunakan pada pergerakan nasional diantaranya Islamisme, nasionalisme, sosial demokrasi, sosialisme, marxisme, komunisme, bahkan anarkisme. Namun dalam penulisan sejarah nasional Indonesia umumnya ragam ideologi di atas disimplifikasi pengelompokannya menjadi Islamisme, nasionalisme, dan komunisme. Seperti yang telah disebut dalam paragraf sebelumnya ragam ideologi menjadikan pergerakan nasional menjadi lebih dinamis. Ideologi dalam gerakan rakyat menentukan bentuk ideal tatanan masyarakat yang dicita-citakan dan pola gerakan yang digunakan. Karena jenisnya yang beragam, diskusi soal pergerakan yang termuat dalam surat kabar maupun pertemuan organisasi dipenuhi oleh pertukaran sekaligus pertarungan wacana. Bahkan tidak jarang menimbulkan konflik diantara tokoh-tokoh pergerakan nasional akibat perbedaan gagasan. Meski bukan satu-satunya faktor, perbedaan ideologi mampu menjadi katalis konflik tokoh-tokoh pergerakan yang bersaing secara politik di tubuh internal organisasinya. Akibatnya, arena politik menjadi semakin luas serta aktifitas politik menjadi semakin intensif disebabkan oleh adanya pendirian berdasarkan ideologi yang dianut (Kartodirdjo, 2014a, hlm. 173).

Salah satu contoh yang paling banyak disebut ialah konflik internal Central Sarekat Islam antara kelompok Tjokroaminoto dengan Semoen

yang dimulai sejak kongres nasional SI pada tahun 1917 di Batavia untuk memperebutkan dominasi SI. Awalnya, perdebatan masih berupa persoalan perbaikan sosial dan sikap kaum bumiputra terhadap pembentukan *Indie Werbaar* (milisi Hindia) untuk mengantisipasi peningkatan agresifitas Jepang di Asia pasca perang dunia I. Kemudian konflik internal CSI meningkat dan mencapai puncaknya pada Oktober 1921 ketika pimpinan CSI dibawah Agoes Salim dan Abdoel Moeis melalui kongres memutuskan kebijakan disiplin partai untuk menyingkirkan kelompok kiri dalam tubuh CSI. Menjelang pengesahan disiplin partai SI sudah terlanjur terbagi dua kubu antara kelompok CSI-Yogyakarta-Moehammadijah yang disebut sebagai SI putih dengan kelompok SI Semarang yang disebut sebagai SI merah. Ketika disiplin partai dilakukan, Semaoen dan pimpinan lima abang SI lokal yang menantang aturan tersebut yaitu Semarang, Salatiga, Sukabumi, Kaliwungu, dan Surakarta memutus hubungan terhadap CSI (McVey, 2017, hlm.147). Akibatnya kelompok SI semarang yang memisahkan diri membentuk Sarekat Rakyat sebagai organnya ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*). ISDV dibawah pimpinan Semaoen kemudian mengubah ISDV menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan pada tahun 1924 resmi menjadi Partai Komunis Indonesia dengan menyatukan anggota-anggota Sarekat Rakyat menjadi anggotanya. Sejak itulah antara Sarekat Islam dengan PKI menjadi dua organisasi pergerakan yang berbeda dengan jalannya masing-masing.

Pada situasi inilah Haji Mohammad Misbach, seorang mubaligh asal Surakarta tampil sebagai tokoh pergerakan yang penting dan dikenal pada zaman yang sedang “bergerak” itu. Misbach aktif sebagai tokoh pergerakan rakyat antara tahun 1914 hingga kematiannya pada tahun 1926. Ruang geraknya meliputi wilayah *vorstenlanden* dan sekitarnya. *Vorstenlanden* ialah sebutan untuk wilayah swapraja yang dikenadalikan oleh empat kerajaan tradisional Jawa yang mencakup sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta (Shiraishi, 1997, 1). Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Soerakarta, Mangkoenegaran, Jogjakarta, dan Pakoelaman. Meskipun ruang geraknya hanya meliputi wilayah *vorstenlanden*, Misbach adalah tokoh pergerakan rakyat yang dikenal luas sebagai propagandis. Bahkan pemerintah kolonial menganggap Misbach sebagai orang yang berbahaya dan perlu untuk diwaspadai.

Misbach adalah tokoh pergerakan yang unik. Mengikuti penulisan hisotriografi Indonesia yang umum bahwa tokoh pergerakan terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Islamis, nasionalis, dan komunis, ideologi politik Misbach sulit untuk diposisikan. Ia adalah seorang Islamis, pendakwah yang menyerukan kepada segenap kaum muslimin

untuk taat pada perintah Allah Swt. dan menjadi umat nabi Muhammad yang baik. Bahkan Misbach seorang Islam sejati, yang tak segan-segan menyerang orang-orang yang menistakan agamanya melalui tulisan maupun debat (Raditya, 2017). Salah satunya terjadi ketika Misbach meminta Martodharsono dan Djojodikoro dari surat kabar *Djawi Hisworo* untuk berdebat di depan publik karena dianggap telah melecehkan nabi Muhammad. Ia juga seorang “komunis”, propagandis yang menggunakan komunisme sebagai teori perjuangan melawan penindasan dan eksploitasi kaum kapitalis terhadap kaum kromo (rakyat biasa). Ia juga seorang nasionalis yang sadar akan pentingnya persatuan nasional “anak Hindia” untuk memperoleh “kamardikaan” (kemerdekaan). Bahkan ia juga seorang humanis yang sering mengingatkan akan pentingnya menegakkan nilai kemanusiaan. Sebagai anak zaman yang hidup di era penuh penghisapan manusia atas manusia, Misbach yakin bahwa Islam dan komunisme sama-sama memiliki semangat perlawanan terhadap penindasan. Dalam majalah *Medan Moeslimin* tahun 1925 Misbach (1925a) mengatakan:

Begitoe Djoega sekalian kawan kita jang mengakoei dirinja sebagai seorang communist, akan tetapi mereka misi soeka mengeloarkan jang bermaksoed melinjapkan agama Islam, itoelah saja berani mengatakan bahoewa mereka boekannja communist jang sedjati atau mereka beloem mengerti doedoeknja communist, poen sebaliknja orang jang mengakoei dirinja Islam tetapi tida setoedjoe adanja communisme, saja berani mengatakan bahoewa ia boekan Islam jang sedjati, atau beloem mengerti betoel doedoeknja agama Islam. (hlm. 4)

Terlebih dahulu perlu diakui bahwa Islamisme dan komunisme secara teoritis dan prinsipil sulit untuk disatukan. Islamisme bersifat teosentris dan mengakui akan adanya kebenaran mutlak dalam firman tuhan. Sedangkan komunisme bersifat antroposentris dan menganggap bahwa kebenaran sifatnya relatif. Meski sulit, dalam konteks sejarah pergerakan nasional keduanya dipertemukan dalam satu kondisi yang sama, yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang timpang, diskriminatif, dan rasis akibat praktik kapitalisme dan posisi pemerintah kolonial sebagai pelindungnya. Dalam konteks inilah Misbach berbicara melalui kutipan di atas bahwa di antara Islamisme dan komunisme tidak perlu ada perselisihan karena sejatinya memiliki musuh yang sama yaitu pemerintah kolonial dan kaum kapitalis. Dalam pemahaman Misbach teori perjuangan komunisme bisa dijadikan alat analisis terhadap praktik kapitalisme di Hindia Belanda dalam semangat pergerakan kaum

muslimin. Sehingga Misbach tidak segan-segan menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim dan komunis sekaligus.

Haji Misbach sebagai tokoh pergerakan nasional yang menggunakan teori perjuangan komunisme, memusatkan perhatiannya pada nasib kaum buruh dan petani di Jawa. Kebetulan sejak berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918 Hindia Belanda mengalami masalah kesejahteraan sosial yang serius dan meningkatnya wabah pes. Pada satu sisi keuntungan ekspor gula meningkat namun di sisi lain hidup petani tetap tidak sejahtera. Kondisi tersebut menyebabkan kaum buruh dan petani lebih mudah untuk diorganisir dalam serikat-serikat kerja ataupun perkumpulan petani. Lantas pergerakan buruh dan petani melalui berbagai serikat sejak tahun 1918 meningkat dalam hal jumlah dan skala gerakan. Kalau dilihat melalui konteks zamannya, kaum buruh dan kaum tani menjadi sasaran utama organisasi pergerakan karena berpotensi membangun gerakan yang masif. Erman dan Saptari (2013, hlm. 14) menjelaskan sejak awal berdirinya organisasi-organisasi politik bumiputra, mobilisasi buruh menjadi hal yang diprioritaskan oleh serikat buruh atau organisasi politik. Tidak jarang serikat-serikat buruh menjadi sayap organisasi pergerakan tertentu, misalkan P.F.B. pimpinan Soerjopranoto merupakan sayap buruhnya Sarekat Islam. Atau kring-kring Insulinde di Surakarta menjadi basis massa-nya Sarekat Hindia/*Nationaal Indische Partij* yang anggotanya ialah para petani Surakarta. Baik organisasi pergerakan maupun serikat buruh keduanya sama-sama memiliki cita-cita nasional. Di Jawa tercatat beberapa kali terjadi aksi-aksi protes antara tahun 1919-1923 dalam skala yang cukup besar oleh kaum tani Surakarta, buruh pabrik gula, buruh kereta api, maupun buruh pegadaian dan percetakan. Selain faktor sosial ekonomi, harapan akan peluang perbaikan hidup melalui protes meningkat pada awal karena gerakan-gerakan tersebut rata-rata relatif berhasil. Salah satunya ialah sebagai berikut (Shiraishi, 1997):

sejak akhir 1919 pemogokan PFB (*Personeel Fabriek Bond*) berlangsung di mana-mana. Berkat sikap netral pemerintah serta keuntungan tinggi pabrik gula di masa *boom*-nya pada tahun 1918 dan 1919, banyak pemogokan mereka yang berhasil. (hlm. 266)

Hal yang sama juga terjadi pada kaum tani seperti yang dicontohkan oleh Shiraishi (1997):

Pada 22 Juni 1919, kira-kira 1500 anggota petani pergi ke kota berjalan kaki dan membawa kartu anggota yang dikeluarkan oleh *kring-kring* polan dan bintaran. *Vergadering* umum yang

batal itu oleh pemimpin Insulinde disebut *Vergadering* umum petani terbuka, tetapi oleh para petani dianggap sebagai bentuk lain dari nggogol, suatu kesempatan untuk berbondong-bondong pergi ke kota untuk menyatakan ketidakpuasan mereka dan menuntut penyelesaian segera. (hlm. 242)

Momentum inilah yang mendorong Misbach untuk ikut terlibat dalam gerakan buruh dan petani baik melalui aksi maupun propaganda. Pada rentang waktu antara 1918-1923 Misbach aktif berpidato dalam berbagai pertemuan organisasi dan mengorganisir kaum tani Surakarta. Bahkan Misbach juga dikenal sebagai propagandis karena perannya dalam dunia pers yang signifikan. Selama keterlibatannya dalam pergerakan nasional ia aktif menulis di surat kabar yang ia kelola.

Tulisan-tulisan Misbach yang dibuat selama tahun 1916-1926 dimuat dalam dua surat kabar yang ia miliki. Sebelum memiliki surat kabarnya sendiri, pada tahun 1914 Misbach bergabung dengan *Indlandsch Journalisten Bond* (IJB) yang diketuai oleh Mas Marco Kartodikromo. Kemungkinan, keikutsertaan dalam IJB yang menyadarkan Misbach akan pentingnya peran surat kabar. Maka setahun kemudian Misbach menerbitkan *Medan Moeslimin* tepatnya tahun 1915 atas bantuan Mas Marco melalui surat kabar *Doenia Bergerak* organ resmi IJB. Penerbitan *Medan Moeslimin* tahun 1915 dilakukan bersama tiga pemuda Islam Surakarta yang diantaranya lulusan pesantren Jamsaren. Mereka adalah Koesen, Tohir, dan Djojodiko. Haji Fachroedin, seorang tokoh pemuda Moehammdijah yang militan asal Yogyakarta juga dirangkul ke dalam *Medan Moeslimin*. Awalnya *Medan Moeslimin* masih menjadi medium dakwah tertulis yang mengajak kaum muslimin untuk menaati ajaran Islam sehari-hari. Selanjutnya didorong oleh keinginan membentuk organ propaganda yang lebih radikal Misbach mendirikan surat kabar *Islam Bergerak* pada tahun 1917 (Suharto, 2017). Baik *Medan Moeslimin* dan *Islam Bergerak*, keduanya menjadi organ propaganda radikal Misbach disamping dakwah Islam. Misbach banyak menulis soal nasib kaum buruh dan petani di Jawa yang ditindas oleh kapitalis dan pemerintah kolonial.

Aktifitas propaganda Misbach di surat kabar *Medan Moeslimin* maupun *Islam Bergerak*, membuatnya dikenal sebagai tokoh propagandis. Hiqmah (2000, hlm. 25) menyebutkan agama Islam sebagai ajaran yang memiliki nilai pembebasan dan progresif di propagandakan terus menerus oleh Misbach melalui *Medan Moeslimin* dan *Islam Bergerak*. Bahkan salah seorang sahabatnya, Mas Marco Kartodikromo (1924, hlm. 6), menyebutkan dimanapun Misbach banyak memimpin

propaganda Islam dan bersikap ramah pada semua orang (secara personal). Label propagandis yang disematkan kepada Misbach juga acapkali dikaitkan dengan organisasi pergerakan yang ia ikuti. Salah satunya, di surat kabar asal Semarang yaitu *Sinar Hindia* (organ Sarekat Islam Semarang), menyebut Misbach sebagai propagandis N.I.P. (*Nationaal Indische Partij*) ketika memberitakan pemenjarannya pada tahun 1919.

Sosok Misbach berdasarkan sejarah singkat yang sudah dideskripsikan di atas penting untuk dikonstruksi ulang dalam penulisan sejarah hari ini. Beberapa hal yang dianggap penting oleh penulis dalam penulisan ini ialah meletakkan Misbach dalam gerakan buruh dan petani, peran pentingnya di bidang pers, dan posisi keunikan ideologisnya dalam historiografi Indonesia-sentris.

Di dalam kajian dan penelitian terdahulu, sudah ada yang menulis peran aktif Misbach secara keseluruhan, tetapi belum ada yang meletakkannya secara khusus dalam konteks pergerakan kaum buruh dan petani. Diantara kajian-kajian terdahulu tentang Misbach yang paling penting untuk disebut ialah karya Takashi Shirashi, Nor Hiqmah, Fitriana Heni Hapsari. Dua penulis pertama karya mereka sudah dijadikan buku yang dikomersilkan dan penulis ketiga masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Pertama, Shirashi tidak menjadikan Misbach sebagai objek utama dalam karyanya dan masih diletakan dalam gerakan rakyat secara umum dengan aneka ragam organisasi dan sifatnya yang radikal. Kedua, karya Hiqmah bukanlah karya sejarah, melainkan karya filsafat yang membedah pemikiran Islamisme dan Komunisme Misbach. Ketiga, karya Hapsari menempatkan Misbach sebagai tokoh lokal dan secara parsial hanya melihat Misbach sebagai tokoh pergerakan Islam. Dapat dilihat bahwa dalam karya-karya terpenting mengenai Haji Misbach belum ada yang menempatkan peran Misbach dalam gerakan kaum buruh dan kaum tani di Jawa secara khusus.

Menempatkan Misbach dalam gerakan kaum buruh dan tani secara khusus tidak lain didasarkan pada fakta sejarah yang tersedia dalam sumber-sumber primer. Di samping peran aktif dalam gerakan Islam yang puncaknya terjadi pada tahun 1919 melalui kongres Islam di Solo, tahun 1918 merupakan masa peralihan dimana Misbach mulai memperhatikan dan terlibat dalam gerakan buruh dan petani. Bahkan setelah ia keluar dari penjara pada November 1919, perhatian Misbach dalam gerakan buruh dan petani menjadi dominan. Pidato-pidato Misbach dalam pertemuan organisasi, maupun tulisan-tulisannya di surat kabar bahasannya tidak jauh dari konflik internal SI maupun sikap permusuhannya terhadap kapitalisme dan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Semuanya

berujung pada buruh dan petani sebagai korban. Bahkan ungunya lah yang dalam banyak hal membuat Misbach beberapa kali keluar-masuk penjara. Inilah salah satu bagian hidup Misbach yang paling menarik dan penuh tantangan untuk dibahas menjadi sebuah karya historiografi yang utuh.

Selanjutnya peran aktif Misbach di bidang pers dan propaganda didasarkan pada konteks zaman pergerakan nasional Indonesia di bidang pers. Pada zamannya, surat kabar menjadi organ yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi pergerakan sebagai sarana komunikasi tidak langsung antar anggotanya. Bagi S. Kartodirdjo (2014a, hlm. 135) silang peran antara pers dan organisasi bumiputra tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling ketergantungan, saling berdampingan dan sukar mempertahankan eksistensinya tanpa yang lain. Alasan ketergantungan diantara keduanya bisa ditemukan dalam pernyataan Surjomihardjo (1980, hlm. 9) yaitu kesamaan pers Indonesia pada masa pergerakan nasional membela tujuan pergerakan dalam menanggapi masalah-masalah masyarakat kolonial. Bahkan peran pentingnya juga bisa dilihat dari reaksi pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan membredel kantor surat kabar pergerakan dan memberikan subsidi bagi surat kabar yang dianggap lunak (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010). Dari ketiga pernyataan diatas bisa dilihat pada konteks zamannya surat kabar merupakan bagian integral dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Surat kabar sebagai medium penyampaian informasi mampu menyebarkan ide dan gagasan pergerakan kaum bumiputra. Di ruang publik ia mampu membentuk opini umum karena bentuknya yang tercetak membuat informasi di dalamnya relatif tetap, mudah diperoleh, dan dicetak secara masif.

Selanjutnya yaitu historiografi Indonesia-sentris dan kaitannya dengan keunikan ideologi politik Haji Misbach. Pada dasarnya, historiografi Indonesia-sentris bisa dimaknai sebagai narasi sejarah Indonesia yang disusun berdasarkan perspektif bangsa Indonesia, mula – mula untuk menggantikan historiografi kolonial yang Belanda-sentris menjadi Indonesia-sentris (Kuntowijoyo, 2000; Subekti, 2012). Sedangkan T. Abdullah (2016, hlm. 7), menyebutnya “sejarah nasional”, yaitu hasil penelitian sejarah yang menggunakan prinsip sederhana ialah Indonesia-sentris tetapi tetap memerlukan disiplin ilmu sejarah yang otentik. Historiografi Indonesia-sentris diantaranya bisa ditemukan dalam enam jilid *Sejarah Nasional Indonesia* karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto serta Sembilan jilid buku *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Karena keduanya paling mudah ditemukan dalam perpustakaan umum dan paling banyak dijadikan

sebagai rujukan awal. Meskipun sampai hari ini historiografi Indonesia sudah berjasa menyediakan narasi sejarah bangsa Indonesia secara komprehensif, bukan berarti di dalamnya luput dari permasalahan.

Salah satunya, masalah historiografi Indonesia-sentris yang dikemukakan oleh Bambang Purwanto salah seorang guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada. Ia mempermasalahkan bahwa historiografi Indonesia-sentris mengalami disorientasi dalam dekolonisasi sejarah bangsa Indonesia. Alih-alih menghadirkan historiografi yang Indonesia-sentris, dalam penulisan justru antipati terhadap cara pandang kolonial dan perspektif alternatif. Padahal praktik demikian tidak jauh berbeda dengan historiografi yang kolonial-sentris (Purwanto, 2007). Masalah yang sejenis juga diungkapkan oleh Takashi Shiraishi dengan menyebut historiografi Indonesia sebagai “historiografi ortodoks”. Maksud Shiraishi ialah bahwa pembagian dinamika sejarah pergerakan nasional dibagi berdasarkan ideologi dan organisasi, ialah Islamisme, nasionalisme, dan komunisme (Shiraishi, 1997, hlm. xii). Pembagian semacam ini, menyebabkan historiografi Indonesia cacat dalam menjelaskan tokoh yang bergerak lebih dari satu arena pergerakan (Nashirulhaq, 2016). Simpulan yang bisa diambil dari ketiga pendapat antara Purwanto, Shiraishi, dan Nasirulhaq ialah historiografi Indonesia sentris belum sempurna dalam menjelaskan kompleksitas dinamika sejarah pergerakan nasional Indonesia. Alih-alih dimaksudkan untuk menumbuhkan nasionalisme generasi muda, justru mempersempit ruang berfikir kritis dan diskusi didalamnya.

Justru dalam keadaan inilah perspektif alternatif dibutuhkan dalam historiografi Indonesia-sentris yang sudah mapan. Perspektif alternatif dalam historiografi bermaksud mengenalkan perspektif yang terabaikan, terlewatkan, atau tak terlihat sekaligus memiliki fungsi pragmatis untuk menyelesaikan permasalahan aktual (Subekti, 2012; Sulistiyono, 2016). Ia bisa dijadikan sebagai pembanding sekaligus pelengkap narasi enam jilid *Sejarah Nasional Indonesia* dan *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Menyadari bahwa objektifitas dalam sejarah sifatnya relatif, berarti pembacaan sejarah dari satu karya historiografi saja tidak cukup. Bahkan jika pembaca dituntut untuk kritis dalam membaca karya-karya sejarah. Membaca berbagai karya sejarah diantaranya bisa menggunakan karya historiografi yang isinya adalah perspektif alternatif. Dengan begitu, pembaca dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber agar tidak terjebak dalam sifat percaya belaka dan mampu bersikap kritis. Karena tradisi kekritisannya dalam ilmu sejarah itulah yang membantu kita untuk menjadikannya sebagai alat intelektual untuk memahami lingkungan dan situasi sosial secara mendalam serta terbebas dari sikap

yang serba percaya belaka (Kartodirdjo, 1993, hlm. 21). Apalagi di era Informasi abad ke-21 penuh masalah sosial berupa kebijaksanaan individu dan masyarakat dalam mengakses atau menyebarkan Informasi “online”. Masalah-masalah berupa “hoax”, kebijaksanaan dalam memilih informasi, menguji validasi informasi yang diperoleh, salah satunya bisa diatasi berupa memperkaya wawasan literasi Ilmiah untuk membentuk pola pikir. Disinilah posisi sejarah Haji Misbach sebagai perspektif alternatif dapat memperkaya literasi masyarakat dalam melihat fenomena sehari-hari, misal soal “seorang komunis sudah pasti ateistis”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dijelaskan secara berurutan, maka penulis tertarik untuk menjadikan peran haji Misbach sebagai objek penelitian Sejarah. Masalah-masalah berupa penempatan Misbach dalam kondisi tertentu, peranannya dalam pers dan propaganda, dan posisinya dalam historiografi Indonesia, mendorong penulis untuk mengkaji dan menghadirkan kembali sosok Misbach di tengah bacaan sejarah hari ini. Sehingga penulis sampai pada simpulan untuk meneliti Haji Misbach dalam penelitian yang berjudul **“Vorstenlanden Bergoentjang: Aksi dan Propaganda Haji Misbach dalam Gerakan Kaum Buruh dan Kaum Tani Jawa Tahun 1916-1926”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, muncul permasalahan yaitu “bagaimana hubungan dan pengaruh propaganda pers yang dipimpin Haji Misbach terhadap munculnya gerakan-gerakan radikal buruh dan petani Jawa tahun 1916-1926” yang diuraikan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan organisasi kaum buruh dan kaum tani Jawa tahun 1916-1926?
2. Bagaimana aksi dan propaganda Haji Misbach dalam gerakan kaum buruh dan kaum tani Jawa tahun 1916-1926?
3. Bagaimana kaitan antara aksi dan propaganda Haji Misbach dengan gerakan kaum buruh dan kaum tani Jawa 1916-1926?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan organisasi buruh dan petani Jawa tahun 1916-1926.
2. Menganalisis bentuk aksi dan propaganda Haji Misbach pada tahun 1916-1926.

3. Menganalisis dinamika aksi dan propaganda Haji Misbach pada tahun 1916-1926.
4. Mengevaluasi kaitan antara aksi dan propaganda Haji Misbach terhadap gerakan kaum buruh dan kaum tani Jawa pada tahun 1916-1926.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian berhasil dicapai, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Manfaat Praktis
 1. Memenuhi syarat penyelesaian studi program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia
 2. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada penulis
 3. Menambah wawasan materi sejarah dalam dunia pendidikan di Indonesia
- b. Manfaat Teoritis
 1. Mengembangkan penelitian Sejarah Pergerakan Nasional khususnya penelitian tentang Haji Misbach terdahulu.
 2. Menambah pengetahuan sejarah pergerakan nasional.
 3. Menambah pengetahuan baru mengenai dinamika pergerakan Haji Misbach sebagai aktor pergerakan pada masa pergerakan nasional.
 4. Menyediakan perspektif alternatif dalam sejarah Indonesia
- c. Manfaat Pendidikan

Dari segi pendidikan, hasil penelitian ini akan menambah materi belajar dalam mata pelajaran sejarah khususnya kompetensi dasar:

 - 3.1 Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Agar hasil penelitian terstruktur dengan baik dan kronologis, maka struktur organisasi skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bagian ini meliputi bagian-bagian yang melatar belakangi penelitian penulis. Bab I meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Struktur organisasi skripsi yang didasarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2015.

Bab II Kajian Pustaka: Kajian pustaka merupakan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan penulis sebagai kerangka berfikir dan alat analisis dalam proses penelitian. Teori dan konsep yang digunakan disesuaikan dengan objek penelitian sehingga hasil analisis tajam dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian: bagian ini meliputi metodologi yang digunakan oleh penulis untuk meneliti masalah yang diangkat. Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi sejarah. Adapun penggunaan metodologi sejarah dikarenakan sesuai dengan bidang studi dan objek penelitian penulis yaitu Sejarah.

Bab IV “*Vorstenlanden Bergoentjang*: Aksi dan Propaganda Haji Misbach dalam Gerakan Kaum Buruh dan Kaum Tani Jawa Tahun 1916-1926”: isinya yaitu Hasil penelitian yang memaparkan temuan-temuan penulis setelah terjun ke lapangan penelitian. Hasil-hasil yang dikemukakan adalah jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Jawaban masalah penelitian sudah berupa hasil interpretasi dan historiografi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kredibel dan relevan.

Bab V Simpulan dan Saran: Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian penulis dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih baik.